

DAFTAR BACAAN

1. Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatblad Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356)

Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989).

Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 138 tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6647).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 710 Tahun 2011).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta

Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia nomor 2099 Tahun 2014).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-48/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009.

Perjanjian Kerja Bersama PT Indofood Sukses Makmur Tbk divisi bogasari periode 2018-2020 (masih berlaku).

Labor Relations Adjustment Act (Act No. 25 of September 27, 1946).

Labor Tribunal Act (Act No. 45 of May 12, 2004).

Act on Promoting the Resolution of Individual Labor-Related Dispute (Act No. 112 of July 11, 2001).

2. Buku:

Abdul Khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul R. Budiono, 2008, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta.

Ari Hernawan, 2018, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, UII Press, Yogyakarta.

Arthuro Bronstein, 2009, *International and Comparative Labour Law: Current Challenges*, Palgrave Macmillan, Genewa.

Bahal Simangunsong dkk, 2009, *Hakim Ad hoc Menggugat (Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial)*, Editor Surya Tjandra, TURC, Jakarta.

Bernard L. Tanya dkk., 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Bryan A. Gardner, *Black Law Dictionary*, dikutip oleh Abdul R. Budiono, 2008, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta.

Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2005, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F.X. Djumialdji & Wiwoho Soejono, 1987, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- H. Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif Teoretis, Praktik Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Zainal Asikin, dkk, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haery Sihombing, “*Myopia Mutu Sebagai Latent Dalam Persaingan dan Pertumbuhan (Kemampuan) Bisnis*”.
- Juhana S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2002, “*Pengantar Hukum Bisnis – Menata Bisnis Modern di Era Global*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Suherman Toha dan Tim, 2010, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*, Jakarta.
- Surya Tjandra, 2007, *Kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 2006-2007*, TURC, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Thony Mc. Adams, 1992, *Law Bussines and Society*, third edition, Irwin, Boston.

Wijayanto Setiawan, 2007, *Pengadilan Perburuhan Indonesia*, L Sidoarjo.

3. Jurnal:

Agus Mulya Karsona, Sherly Ayuna Putri, Ety Mulyati & R. Kartikasari, “Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 158.

Bahder Johan Nasution, “Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Pancasila”, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I Januari 2015, h. 4.

Christina NM Tobing, “Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 Juli 2018, h. 300.

Doni Yusra, “Pengaruh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Lex Journalica*, Vol. 3 No. 2 April 2006, h. 13.

Herliana Omara, “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 1 Februari 2012, h. 175-186.

Kazuo Sugeno, “The Significance of Labour Relations Commissions in Japan’s Labor Dispute Resolution System”, *Japan Labor Review*, Vol. 12 No. 4 Autumn Tahun 2015, h. 13-31.

Mila Karmila Adi, “Masa Depan Arbitrase sebagai Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 17 April 2010, h. 310.

Rai Mantili, "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 6 Nomor 1 September 2021, h. 47-65.

Tata Wijayanta, "Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam Perkara Kepailitan", *Legality*, Vol. 15 No. 1 Maret – Agustus Tahun 2007, h. 128-141.

d) Tesis/Disertasi:

Agusmidah, 2007, "Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundangundangan ketenagakerjaan", *Disertasi*, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan.

Slamet Wibowo, 2006, "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Semarang", *Tesis*, Undip, Semarang.

Tata Wijayanta, 2008, "Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan", *Tesis*, Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi: Tidak Diterbitkan.

N. Krisnawenda, "Hibridasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitase Dalam Rangka Mencapai Kepastian Hukum", *Disertasi* Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

d) Website:

http://www.bphn.go.id/data/documents/penyelesaian_perselisihan_hubungan_industrial.pdf, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, h. 72.

Gindo Napdapdap, "Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial," http://kpsmedan.org/index.php?option=com_content&view=article&id, diakses tanggal 23 Mei 2019.